



INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)



ARAHAN PENYUSUNAN REVISI OWP & AWP 2022 UNTUK BBWS DAN BWS

BANDUNG, 04 NOVEMBER 2021



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
2021

ARAHAN PENYUSUNAN REVISI AWP SATKER OP B/BWS TA.2022



1. Dianggarkan masing-masing B/BWS untuk kegiatan Pembentukan Unit Pengelola Irigasi (UPI) sebesar Rp.500 Juta dan Operasional Unit Pengelola Irigasi (UPI) sebesar Rp. 200 Juta.
2. B/BWS menyiapkan KAK dan RAB sesuai pagu dan kondisi masing-masing.
3. Agar direncanakan dengan cermat semua sisa dana OWP dialokasikan ke dalam AWP 2022.
4. Tidak terdapat OWP balance **NEGATIF**.
5. Kegiatan prioritas pada Tahun 2022 lainnya adalah : Update PAKSI, Pastikan sudah masuk dalam AWP TA. 2022
6. Memperhatikan target output sesuai dengan rencana kegiatan (DLI dan Non DLI)
7. 7 (tujuh) B/BWS akan melaksanakan OP partisipatif pada DI yang telah ditetapkan

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM DESK ASISTENSI REVISI AWP TA.2022



1. Usulan OWP dibuat format semula-menjadi
2. Realisasi Keuangan Kegiatan OP TA. 2018-2021
3. Usulan revisi AWP TA. 2022. beserta KAK dan RAB yang diperlukan.
4. Soft Copy DIPA / DIPA Revisi Satker OP Tahun 2021
5. Dokumen tersebut diserahkan melalui chat/WA :

Wilayah Barat : Sdr. Sulaeman - 0857 6588 8635

Wilayah Timur : Ibu Irmawati - 0812 1305 3911

KONSEP PEMBENTUKAN UPI

LATAR BELAKANG



Luas D.I di Indonesia mencapai \pm 9 juta ha pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Luasnya DI tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang serius, agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi



Banyak faktor yang menyebabkan kondisi jaringan irigasi semakin menurun antara lain biaya pemeliharaan kurang memadai, terbatasnya SDM, pengambilan air liar dengan pompa, alih fungsi lahan, ketidakpatuhan masa tanam, dan kurangnya koordinasi antar pengamat



Faktor utama yang sangat menentukan keberlanjutan layanan jaringan irigasi antara lain : Faktor Anggaran, Kualitas dan Kuantitas SDM, Kondisi SDM saat ini baik pengamat, juru dan PPA yang merupakan petugas OP pada DI kewenangan Pusat statusnya sebagai pegawai daerah (TPOP) dikarenakan SDM Pusat yang terbatas sedangkan jaringan irigasi yang ditangani cukup luas



Guna mengoptimalkan tugas Kabid/Kasi OP di BBWS/BWS terutama tugas koordinasi antar pengamat dalam pelaksanaan kegiatan OP Irigasi, dipandang perlu untuk dibentuk Unit Pengelola Irigasi (UPI) pada tiap-tiap Daerah Irigasi



Pembentukan UPI merupakan target dalam Renstra SDA 2020-2024, bahwa salah satu strategi dalam rangka peningkatan layanan pengelolaan irigasi adalah melalui pembentukan Unit Pengelola Irigasi (UPI)

KONSEP PEMBENTUKAN UPI



Kriteria Pembentukan UPI

1. Daerah irigasi lintas provinsi dengan luas layanan > 3.000 ha
2. Daerah irigasi lintas provinsi kabupaten/kota dengan luas layanan > 7.500 ha.
3. Daerah irigasi utuh dalam kabupaten/kota dengan luas layanan > 10.000 ha...
4. Jumlah pengamat lebih dari 1 (satu).



Output

Mendorong Koordinasi antar petugas OP, mengkoordinir pelaksanaan OP, serta peningkatan kualitas pengelolaan irigasi yang akuntabel dan berkelanjutan, dengan sasaran :

1. Peningkatan layanan kinerja Irigasi dengan indikator jelas dan terukur .
2. Efektifitas manajemen pengelolaan irigasi (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan) menjadi lebih baik.

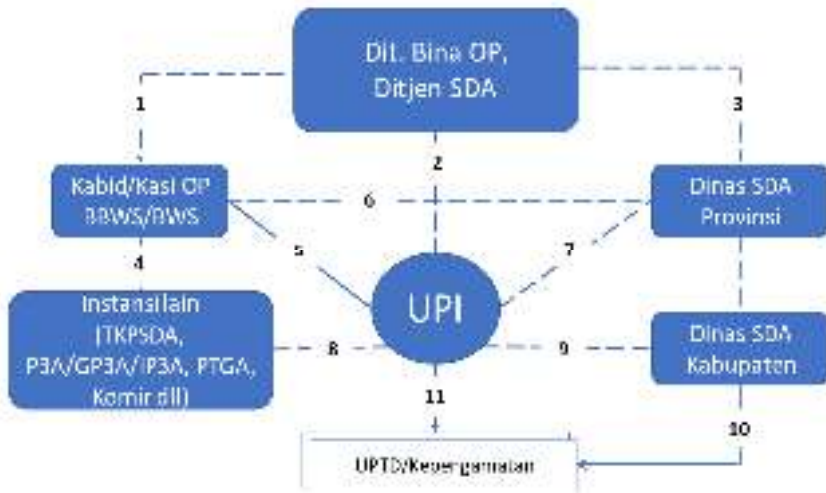
Outcome

1. Peningkatan intensitas tanam
2. Mendukung peningkatan produktivitas tanam dan kesejahteraan petani
3. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan irigasi

UPI - HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA DAN STRUKTUR ORGANISASI

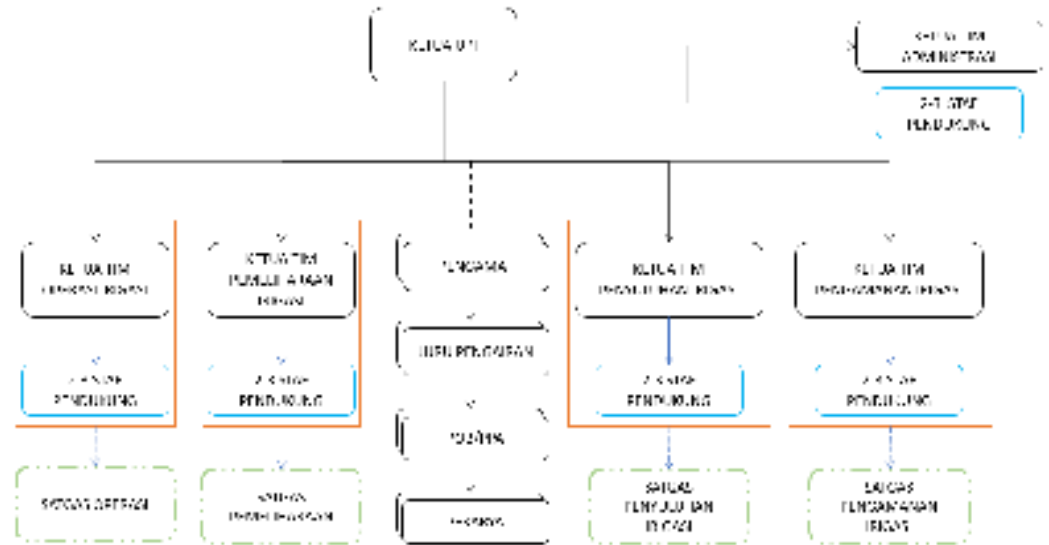


Hubungan Antar Lembaga:



Merupakan titik simpul koordinasi antara BBWS/BWS, Dinas PU/SDA Provinsi, Dinas PU/SDA Kabupaten, UPT/Pengamat serta Komisi Irigasi

Struktur Organisasi Type I:



RAB TENTATIF PEMBENTUKAN DAN OPERASIONAL UPI



No.	Uraian Jenis Pengeluaran	Perkiraan Biaya (Rp)
I	PEMBENTUKAN UPI	500.000.000
A	SK PEMBENTUKAN UPI	xxx
B	FASILITASI	xxx
1	Perbaikan/Pemeliharaan gedung (minimal 70 m2)	xxx
2	Peralatan kantor :	xxx
3	Peralatan Transportasi	xxx
4	Peralatan Komunikasi	xxx
5	Peralatan Monitoring Visual Daerah Irigasi	xxx
II	OPERASIONAL UPI	200.000.000
A	Belanja Jasa Profesi	xxx
B	Belanja Bahan (ATK)	xxx
C	Biaya Pemeliharaan Gedung	xxx
D	Langganan listrik, internet dan Teleconference	xxx
E	Belanja Perjalanan Biasa	xxx
Total		700.000.000

Ket : xxx diisi sesuai kebutuhan Balai

PELAKSANAAN OP PARTISIPATIF

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN OP PARTISIPATIF



Pengelolaan sistem irigasi perlu diselenggarakan secara partisipatif, akuntabel, berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A



Penurunan rasa memiliki infrastruktur irigasi dikalangan petani dan penurunan kemampuan petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi



Pelibatan semua instansi pemerintah (Pusat, daerah) dan petani dalam koordinasi pengelolaan irigasi



Rencana pembentukan Unit Pengelola Irigasi (UPI) pada Daerah Irigasi kewenangan Pusat



MAKSUD DAN TUJUAN OPIP



MAKSUD

Untuk memberi acuan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam melaksanakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Partisipatif (OPIP) agar masyarakat petani/ P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan Operasi & Pemeliharaan di jaringan irigasi Primer dan Sekunder.

TUJUAN

Agar pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan irigasi dapat memahami pentingnya keterpaduan, kebersamaan pada semua tingkatan sehingga pelaksanaannya dapat mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan system irigasi

KERJASAMA OP IRIGASI PARTISIPATIF



BENTUK KERJASAMA OPIP



1.SWAKELOLA:

Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi lain atau kelompok masyarakat.



2.KONTRAKTUAL:

Penyedia jasa/Kontraktor yang memenangkan kontrak melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) di area kerja daerah irigasi terkait, yaitu dengan meng-subkontrakkan sebagian pekerjaannya dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) kepada P3A/GP3A/IP3A diketahui oleh pemberi pekerjaan (PPK).

ALOKASI PELAKSANAAN OP PARTISIPATIF (OPIP)



RAB Pelaksanaan OP Partisipatif (OPIP)			
No	Kegiatan	Harga Satuan (Rp)	Pagu OWP (Rp)
	Pelaksanaan OP Partisipatif		134.929.739.927
1	DI. Jambo Aye Langkahan - BWS Sumatera I	1.466.265	28.552.569.080
2	DI. Klambu - BBWS Pemali Juana	884.486	33.124.868.100
3	DI. Manganti - BBWS Citanduy	1.283.957	30.452.182.800
4	DI. Serayu - BBWS Serayu Opak	908.205	18.886.130.496
5	DI. SIM - BBWS Bengawan Solo	1.031.343	11.200.389.118
6	DI. Toraut - BWS Sulawesi I	1.032.635	8.054.550.550
7	DI. Singkoyo - BWS Sulawesi III	1.534.096	4.659.049.783

KRITERIA SELEKSI P3A/GP3A/IP3A UNTUK SWAKELOLA



No	Tipe Swakelola	Bentuk Kerjasama			Klasifikasi P3A/GP3A/IP3A				Syarat	
		P3A	GP3A	IP3A	BB	SB	B	M	Administrasi	Teknis
1	Tipe I	SKKS	SKKS	SKKS	BB	SB	—	—	ADART di ketahui Kepala Desa dan Camat	Belum Terampil
2	Tipe III	SPKS	SPKS	SPKS	—	—	B	M	ADART disahkan dengan akta notaris	Terampil
3	Tipe IV	SPKS	SPKS	SPKS	—	—	B	M	ADART disahkan dengan akta notaris terdaftar di Kementerian	Terampil

Keterangan:

Belum Berkembang (BB): < 50

Sedang Berkembang (SB): 50-70

Berkembang (B): >70 – 90

Mandiri (M): > 90

JADWAL TENTATIF KEGIATAN OP PARTISIPATIF



No	Kegiatan	Bulan												Keterangan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pelaksanaan O&P Partisipatif														
A	Management dan Operasi														
B	Pemeliharaan														
I	Persiapan														
1	Pra Sosialisasi P3A/GP3A/IP3A														
2	Clearance Pemetaan Program Balai (OP, PJPA)														
3	Penyiapan Dokumen (KAK, RAB dan Spek. Teknis)														
4	Pelaaksanaan Sosialisasi Penilaian Kinerja														
	4.1 Sosialisasi														
	4.2 Penilaian Kinerja P3A/GP3A/IP3A														
5	Verifikasi P3A/GP3A/IP3A														
6	Penetapan dan Pengesahan P3A/GP3A/IP3A														
7	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan (P3A/Gp3A/IP3A, UPTD dan staf OP														
8	Penelusuran Jaringan Irigasi (Penjelasan Lapangan Sebelum Kontrak)														
9	Penyusunan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A														
10	Verifikasi Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A														
11	Penetapan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A														
12	Penanda tanganan Pakta Integritas dan perjanjian														
II	Pelaksanaan Fisik Pemeliharaan														
13	Pelaksanaan Kesepakatan /perjanjian kerjasama														
14	Pencairan Dana Tahap I (Uang Muka)														
15	Proses Pencairan Dana Tahap II dan III														
16	Pemantauan dan Evaluasi														
17	Serah Terima Pekerjaan (menyerahkan ke PPK)														
18	Pelaporan Kegiatan OPIP														



1. RINCIAN KEGIATAN OP PARTISIPATIF FISIK

No.	Kegiatan	Sumber Pendanaan
		Loan IPDMIP
I JARINGAN IRIGASI		
1	Jaringan Primer	√
2	Jaringan Sekunder	√
II BENDUNG		
1	Pengadaan Barang	√
2	Pekerjaan Pemeliharaan	√

RINCIAN KEGIATAN OP PARTISIPATIF (TENTATIF)

2. RINCIAN KEGIATAN OP PARTISIPATIF FISIK

No.	Kegiatan	Sumber Pendanaan		Keterangan
		Loan IPDMIP	APBN	
1 Pemberdayaan				
a	Inventarisasi P3A/GP3A/IP3A	√		
b	Fasilitasi pembentukan/revitalisasi P3A/GP3A/IP3A	√		
c	Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A	√		
d	Penyuluhan irigasi	√		
e	PSETK		√	
2 Penilaian kinerja P3A/GP3A/IP3A				
a	Pembentukan Unit Pengelola Irigasi (UPI)	√		Pendanaan di UPI
b	Revitalisasi PTGA		√	
c	Operasionalisasi WRKMC	√		Pendanaan di WRKMC
d	Pembentukan Komisi Irigasi Antar Provinsi	√		Sesuai kondisi/lokasi
e	Peningkatan kinerja Komisi Irigasi	√		
3 Bimbingan Teknis/Pelatihan/Fisik				
a	Pelaksanaan OP kerjasama dengan P3A (non APBN)	√		
b	Rekrutmen petugas OP (kebutuhan sesuai Form Inventarisasi Data Personil OP)	√		
c	Bimbingan teknis petugas OP (termasuk PAKSI, SMOPI, AKNOP, dll)		√	
d	Penerapan Irrigation Service Agreement (ISA)			Belum ditentukan
e	Penyusunan PAI, IKSI dan AKNOP Irigasi		√	
f	Penertiban/pengamanan jaringan irigasi	√		sesuai kebutuhan
g	Pemenuhan fasilitas OP irigasi (Kantor, alat transportasi, rumah dinas, peralatan OP, dll)		√	
h	Kalibrasi semua bangunan ukur irigasi		√	
i	Melengkapi semua papan operasi/papan pasten	√		
j	Penerapan pelaporan OP berbasis aplikasi SMOPI		√	
k	Pemenuhan pendukung kegiatan OP (Manual OP DI, Manual OP Pengamat, Manual OP Juru, Skema Jaringan, Skema Bangunan, Peta DI, Peta wilayah kepengamatan, Peta wilayah Juru, dll)	√		

PEMBENTUKAN WRKMC

LATAR BELAKANG



- ❑ Konsep PTGA tahun 1973 menempatkan P3A bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek atau pelaku utama dalam pengelolaan irigasi.
- ❑ Adanya perubahan peraturan-peraturan terkait (UU 22/1999, UU 7/2004, PP 38/2007)
- ❑ Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menggunakan prinsip satu manajemen (*single management*).
- ❑ PTGA ke depan dipandang perlu fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air secara keseluruhan.
- ❑ PTGA diharapkan dapat menjadi *knowledge centre* dibidang SDA/*Water Resources Knowledge Management Centre* (WRKMC) atau Pusat Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Air (PMPSDA) di tiap BBWS/BWS.
- ❑ Kebutuhan akan WRKMC didasarkan pada beberapa kondisi antara lain:
 - 1) Keberadaan data dan informasi, kajian, studi terkait sumber daya air masih mentah dan belum diolah.
 - 2) Lembaga koordinasi SDA perlu didukung oleh data maupun informasi yang handal
 - 3) Pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air masih terputus atau belum dipahami oleh semua tingkatan pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota.
 - 4) Rendahnya Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
 - 5) Data dan informasi sumber daya air belum terpadu serta belum diolah dan ditingkatkan menjadi informasi hingga menghasilkan pengetahuan.
- ❑ WRKMC perlu dibentuk sebagai salah satu bagian dari unit PTGA selain sebagai akselerator penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air juga berfungsi mentransformasikan berbagai data sumber daya air.

MAKSUD DAN TUJUAN



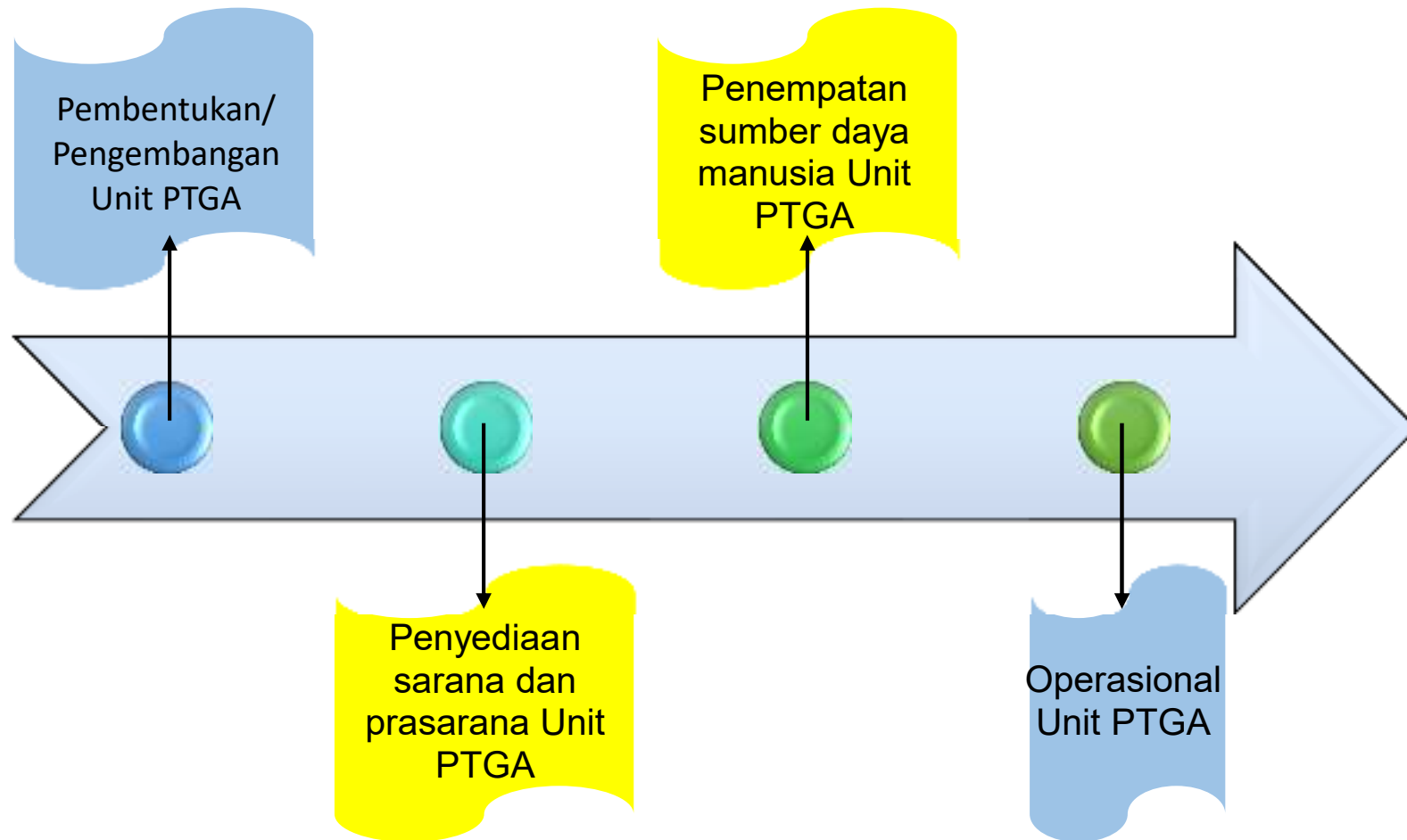
MAKSUD

Sebagai acuan bagi BBWS/BWS untuk membentuk dan mengembangkan Unit Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) yang fungsinya sebagai pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan pemberdayaan serta WRKMC.

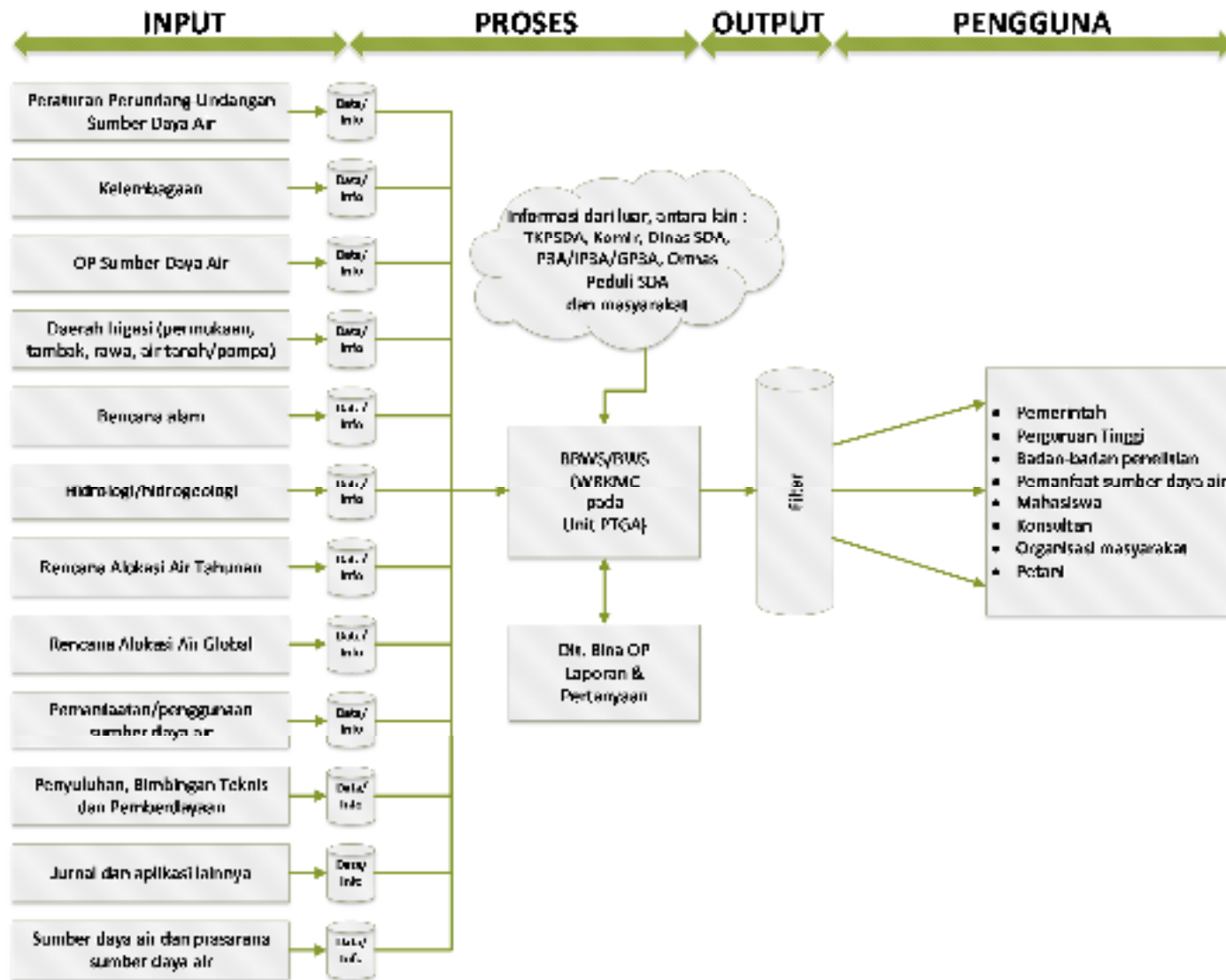
TUJUAN

Agar BBWS/BWS dapat dan melaksanakan penataan Unit Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan, bimbingan teknis dan pemberdayaan serta WRKMC secara optimal.

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN OPERASIONAL UNIT PTGA



SKEMA WRKMC PADA UNIT PTGA



**KESIMPULAN :
PELAKSANAAN UPI, OP PARTISIPATIF, DAN WRKMC**



UPI

1. Pendanaan kegiatan UPI akan dialokasikan ke Balai melalui revisi OWP AWP 2022.
2. Ketua UPI adalah seorang ASN
3. Satgas-satgas pada UPI bersifat tidak permanen (sesuai kebutuhan)
4. Pembentukan UPI Tahun 2022 pada 18 Balai. 1 Balai sudah terbentuk Tahun 2021 (BBWS Citanduy – DI. Manganti) dan 1 Balai tidak ada DI yang memenuhi kriteria UPI (BWS Sumatera II).

OP PARTISIPATIF

1. OP Partisipatif dilaksanakan pada lokasi pembentukan UPI;
2. Pelaksanaan Tahun 2021 yaitu pada DI. Manganti;
3. Pelaksanaan tahun 2022 :
 - (i) D.I Jambo Aye Langkahan;
 - (ii) D.I Klambu;
 - (iii) D.I Manganti;
 - (iv) D.I Serayu;
 - (v) D.I SIM;
 - (vi) D.I Toraut;
 - (vii) D.I Singkoyo.
4. Balai mempersiapkan data: Keandalan ketersediaan air, prasarana/infrastruktur irigasi, Pengelolaan irigasi, Kelembagaan Pengelola Irigasi, dan Kondisi SDM Pengelola Irigasi

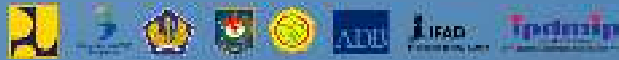
WRKMC

1. Pendanaan WRKMC akan dibagi ke Satker OP dan Satker Perencanaan Balai;
2. Kegiatan pada Satker OP: Penyusunan SK, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, dan Operasional WRKMC;
3. Kegiatan pada Satker Perencanaan Balai: pembangunan Gedung dan penyediaan fasilitas yang bersifat penambahan aset.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Jl. Pattimura No.20, Gedung SDA Lantai 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. (021) 739500-Fax (021) 7246312



TERIMA KASIH